Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS *(e-ISSN. 2964-139X)*
Vol. 4 No. 3, Juli 2025 *(P-ISSN. 2964-1381)*

PENDIDIKAN INKLUSIF TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI TINGKAT LOKAL

Dewi Ambarwati*[1], Dafis Ubaidillah Assiddiq[2], Husnul Hakim Sy[3], Muhammad Imron[4]

[1,2,3,4]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Raden Rahmat Malang
*e-mail: ambarwatidewi269@gmail.com[1], dafiezassiddiq@gmail.com[2]

Corresponding author:
Dafis Ubaidillah Assiddiq
Ilmu Pemerintahan UNIRA Malang
Email: dafis.assiddiq@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan dari kegiatan masyarakat ini, diharapkan para peserta khususnya perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik, dapat memperoleh gambaran dan wawasan yang komprehensif, tidak hanya sebatas pada teori semata melainkan juga dikombinasikan dengan kondisi empirik yang ada di tengah-tengah Masyarakat. Peran perempuan di ranah politik memiliki beberapa tantangan, antara lain terkait dengan perspesi masyarakat terkait patriarki, perbedaan gender, kurangnya akses dan informasi politik, serta terbatasnya ruang pendidikan yang inklusif. Padahal, perempuan memiliki peluang yang besar untuk mengawal demokrasi dan aspirasi masyarakat melalui pengambilan keputusan publik. Urgensi penguatan peran perempuan tidak hanya tentang kesetaraan gender, tetapi juga tentang demokrasi yang representatif. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode penyuluhan dan diskusi partisipatif dalam forum-forum di tingkat lokal. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar tentang hak-hak politik bagi perempuan, mekanisme pemilihan umum, dan strategi keterlibatan dalam forum-forum musyawarah di tingkat lokal. Hasil dari kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan adanya motivasi dan inspirasi peran perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik di lingkungannya. Pendidikan politik inklusif dapat menjadi sarana pemberdayaan perempuan dalam membangun kepercayaan diri dan kesadaran kolektif untuk terlibat aktif dalam platform demokrasi, khususnya di tingkat lokal.

***Kata kunci**: Politik; Perempuan; Politik Inklusif; Demokrasi; Pemilihan Umum.*

ABSTRACT
The aim of this community activity is that it is hoped that participants, especially women who want to participate in the world of politics, can gain a comprehensive picture and insight, not only limited to theory alone but also combined with empirical conditions that exist in the midst of society. The role of political women to date still faces several challenges, including those related to patriarchal culture, lack of access and political information, and limited inclusive educational space. In fact, women have a high opportunity to oversee democracy and community aspirations through public decision-making. The urgency of strengthening the role of women is not only about gender equality, but also about representative democracy. This service activity was carried out using counseling methods and participatory discussions in forums at the local level. The material presented includes a basic understanding of political rights for women, election mechanisms, and strategies for involvement in local deliberation forums. The results of the activities that have been carried out show that there is motivation and inspiration for the role of women to actively participate in social and political activities in their environment. Inclusive political education can be a means of empowering women in building confidence and collective awareness to be actively involved in the democratic platform, especially at the local level.

***Keywords**: Politics; Women; Inclusive Politics; Democracy; General Elections.*

PENDAHULUAN

Politik acapkali dinilai dari beberapa perspektif berbeda dari sudut pandang masyarakat awam. Muncul beberapa argumentasi yang menyatakan berpolitik itu menakutkan, tidak sesuai hati nurani bahkan merampas hak-hak rakyat. Namun, tidak banyak yang melihat

sisi keunggulan dalam berpolitik itu sendiri, seperti halnya dapat mewakili aspirasi masyarakat akar rumput, dapat bersumbangsih dalam perumusan kebijakan, hingga dapat memberikan nilai *(value)* bagi masyarakat bahwa politik itu menyenangkan, dalam arti jika kita dapat menggunakan politik dengan tepat, maka negara dapat dengan mudah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. *Politics involve decision making among people in some large group* (Ethridge & Handelman, 2010).

Adanya anggapan dalam masyarakat tersebut memiliki urgensitas tersendiri untuk diubah melalui adanya pendidikan politik yang inklusif bagi masyarakat. hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami dan peka terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitar mereka. Selain itu, dengan adanya kepekaan sosial tersebut, masyarakat tidak canggung untuk turun serta dalam dunia politik, baik politik praktis maupun politik taktis. Peran serta aktif masyarakat pun tidak terbatas bagi kaum laki-laki saja. Meskipun sampai saat ini selalu ada upaya untuk memperbaiki persolan tersebut. Dewasa ini, para politikus perempuan sering bermunculan untuk mengeluarkan aspirasi, mewakili suara-suara komunitas yang berbasis pada kepentingan publik.

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan meskipun pernah mengalami penurunan dari 1992 ke 1999, namun setelah itu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2009. Pada Pemilu 1999 (9,2%), Pemilu 2004 (11,8%), dan Pemilu 2009 (18%). Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan, salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan Perempuan Hardjaloka, 2012).

Representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengaruh Utama Gender menjadi dasar pijakan politis bagi perempuan untuk berpatisipasi di dalam pembangunan. Apabila melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 278.696,2 jiwa, yang terdiri dari jumlah perempuan sebanyak 137.909,4 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 140.786,8 jiwa. Hal tersebut menunjukkan selisih antara laki laki dan perempuan kurang lebih 3 juta, dengan total laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Meskipun jumlah perempuan lebih sedikit, namun masih ada beberapa peluang strategis untuk mengisi dominasi dan kekosongan peran politik yang mewakili perempuan, dengan cara perempuan lah yang harus berdaya dan berkehendak untuk berperan di dunia politik dengan berbagai upaya strategis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik dapat memberikan keuntungan kebijakan yang strategis dan berpihak kepada rakyat, seperti halnya dengan mengajukan usulan-usulan kebijakan yang selama ini bersentuhan langsung dengan perempuan, seperi perlindungan perempuan dalam rumah tangga, pekerjaan bahkan di fasilitas umum. Seperti yang dijelaskan realease world bank tentang "Unlocking growth: The untapped power of women in political leadership" yang menyebutkan bahwa "*for example, the absence of legislation prohibiting sexual harassment in public spaces, such as mass transit, hampers women's ability to access employment opportunities and fully participate in the workforce. The lack of*

services and financing for parents with young children places a disproportionate burden on women. Furthermore, the effectiveness of gender-sensitive legislation is often undermined by inadequate enforcement mechanisms. In many regions, women's limited political clout fuels a self-perpetuating cycle of restricted legal rights and reduced economic empowerment" Mehrin & Weh, 2024).

Sementara itu, secara regional, Menurut BPS jika dikaitkan dengan keterlibatan politik perempuan di parlemen untuk wilayah Kabupaten Malang di tahun 2022-2023 di angka 22,0%, yang berarti ditemukan adanya stagnansi. Padahal jika dilihat dari bonus geografi dan demografi di Kabupaten Malang karena 71,45 persen penduduknya berada di usia produktif (15-64 tahun). Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,6. Secara historis, politik di Kabupaten Malang masih didominasi oleh elite politik laki-laki. Budaya patriarki dan struktur kekuasaan yang hierarkis menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang ingin memasuki arena politik. Partai politik sebagai kendaraan utama pencalonan legislatif pun masih kerap menempatkan perempuan pada nomor urut "pelengkap" demi memenuhi kuota 30% yang diamanatkan undang-undang. Padahal, Kabupaten Malang juga dikenal memiliki gerakan perempuan yang cukup aktif, baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa potensi kepemimpinan perempuan sebenarnya sudah ada dan perlu difasilitasi secara lebih serius agar mampu menembus arena politik formal.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ditemukan adanya urgensi peningkatan partisipasi perempuan untuk memenuhi prinsip demokrasi partisipatoris khususnya di Kabupaten Malang, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan arah pembangunan daerah, diantaranya adalah (1) menjaga legitimasi lembaga politik karena lembaga yang tidak merepresentasikan komposisi masyarakat dianggap kurang mencerminkan aspirasi publik secara utuh; (2) menghilangkan bias patriarki dalam politik, yang seringkali membuat isu-isu spesifik perempuan seperti kekerasa, kesehatan reproduksi, dan ekonomi rumah tangga tidak menjadi prioritas; dan (3) keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif maupun eksekutif bukan sekadar pemenuhan formalitas kuota, tetapi esensi dari demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, melihat adanya potensi yang dimiliki Kabupaten Malang untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik, maka perlu untuk mengkaji dan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi kepada persepsi perempuan di bidang politik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang melengkapi beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh: (1)Yuyun Fitriani, dkk yang berjudul Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi; (2) kegiatan pengabdian yanhg dilakukan oleh Istia'anah ZA dan Ani Yunita dengan judul Penguatan Kesadaran Politik Kaum Remaja Perempuan Melalui Kajian Regulasi Kuota 30% Perempuan di Lembaga Legislatif; dan (3) pengabdian oleh Fitra Hadi Khaz dan Refdi yang berjudul Pendidikan Politik Bagi Perempuan sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi panel dengan beberapa narasumber dalam 1 kegiatan yang merupakan seminar yang bertemakan Peran Perempuan dalam Partisipasi dan Pendidikan Politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama dari KPU Jawa Timur beserta Pusat Kajian Kebijakan dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Kegiatan ini dihadiri oleh 3 narasumber yang masing-masing mewakili KPU, PUSKADA dan PAKU UNIRA Malang, serta peserta yang dikategorikan pemilih pemula yang bergender perempuan.

Kegiatan ini diawali dengan pemaparan *key note speaker* dari KPU Jawa Timur yang menjelaskan tentang pentingnya partisipasi pemilih pemula khususnya perempuan untk mewakili masyarakat di tingkat lokal. Perempuan memiliki peluang dan tantangan tersendiri, namun hal itu dapat diatasi ketika terdapat visi dan misi untuk berpolitik dengan memperhatikan kepentingan publik. Selanjutnya, pemaparan perwakilan narasumber dari PUSKADA yang berbicara tentang bagaimana cara perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik khususnya di tingkat lokal. Kemudian, materi terakhir disampaikan narasumber yang mewakili PAKU UNIRA Malang yang menekankan pada politik berintegritas. Politik berintegritas menekankan bahwa adanya proses politik dan kebijakan yang benar-benar dapat memberdayaan perempuan untuk dapat memberikan aspirasi bagi masyarakat dan merubah lingkungan lebih baik.

Maka dapat dijelaskan lebih lanjut beberapa parameter dan sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat yang bertajuk seminar melalui tabel berikut:

Tabel 1. Parameter dan Sasaran Penelitian

Parameter	Isi
Target Peserta	Pemilih pemula baik perempuan dan laki-laki, dapat berasal dari masyarakat umum, mahasiswa, aktivis dan pegiat pendidikan.
Waktu Pelaksanaan	Sabtu, 16 November 2024, pukul 15.00-17.30
Tempat Pelaksanaan	Aula PC NU Kota Malang
Materi	a. Peran Aktif Perempuan melalui Gerakan Politik Akar Rumput b. Politik Berintegritas
Sasaran	Afektif (nilai&sikap), Piskomotorik (keterampilan) dan Interaksi sosial (jejaring)

Setelah pemaparan dari ketiga narasumber selesai, maka kegiatan selanjutnya adalah tahapan diskusi panel dengan melibatkan narasumber. Peserta diminta membuat beberapa kelompok kecil dan mendiskusikan satu tema pemantik. Selain itu peserta juga diminta memberikan ide yang solutif berkenaan dengan tema pemantik tersebut. Tahapan diskusi panel ini kurang lebih dilaksanakan selama 30 menit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan dalam politik memiliki potensi keunggulan yang utama dalam berkontribusi untuk pembangunan dan kebijakan.

Partisipasi politik masyarakat secara umum di berbagai literatur menjelaskan berbagai keterlibatan masyarakat yang dimulai sejak memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih,

meneliti dan mempelajari para calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, melaporkan pelanggaran penyelenggara dan peserta dan mencari tahu tentang calon pemimpin, memberikan suara pada hari pemungutan. Lebih lanjut, dijelaskan, partisipasi politik masyarakat meliputi (Halim & Lalongan, 2016) : a) keterlibatan dalam pemungutan suara; b) terlibat dalam kegiatan partai dan kampanye; c) aktvitas politik Masyarakat; d) melakukan hubungan dalam kepengurusan partai politik; e)menghadiri pertemuan partai politik; f) menyampaikan protes atau usulan politis; g) melakukan aktivitas komunikasi dengan partai politik.

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama berfungsinya sistem demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi tidak hanya menuntut adanya pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik masyarakat menjadi penopang utama legitimasi kekuasaan dan jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Tanpa partisipasi politik yang sehat dan inklusif, demokrasi akan bersifat semu dan berpotensi dikooptasi oleh kelompok-kelompok elit tertentu.

Sesuai tema kegiatan yang dipilih, tujuan akhir dari kegiatan ini adalh untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula (perempuan) dalam dunia politik. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan edukasi politik yang adaptif dan memberikan ruang aspirasi publik yang memadai. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 (lima puluh) peserta yang berasal dari berbagai profesi, seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh dan petani. Mayoritas yang hadir adalah perempuan. Pemaparan materi utama diberikan setelah peserta menyimak materi dari *keynote speaker* sebagai pemantik dalam kegiatan ini. Penyampaian materi berlangsung sangat kondusif, disertai dengan tanya jawab singkat berkaitan dengan hal-hal yang sering dijumpai di lapangan.

Gambar 1. *Pemaparan materi dengan judul: Partisipasi Politik Berintegritas bagi Perempuan*

Materi yang berisi tentang politik berintegritas pada dasarnya bertujuan agar masyarakat secara umum memahami, bahwa integritas adalah kata kunci dalam berpolitik. Jika masyarakat tidak memiliki keahlian dan edukasi politik yang tepat, maka potensi untuk apatif terhadap politik, acuh terhadap kondisi sosial hingga terjadinya banyak golongan putih (golput) semakin meningkat. Politik seyogyanya menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kehendak

ataupun aspirasi publik, bukan kepentingan golongan. Berkelindan dengan hal tersebut, untuk mewakili aspirasi masyarakat dibutuhkan para wakil rakyat yang mampu dan mau untuk melihat dan mendengar serta mengetahui secara nyata apa kebutuhan yang benar-benar ingin dicapai.

(a) (b) (c)

Gambar 2. *Materi Edukasi Politik* (a) makna politik bagi perempuan (b) upaya (c) politik integritas

Sesuai dengan tujuan dari kegiatan masyarakat ini, diharapkan para peserta khususnya perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik, dapat memperoleh gambaran dan wawasan yang komprehensif, tidak hanya sebatas pada teori semata melainkan juga dikombinasikan dengan kondisi empirik yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Seperti halnya pada paparan materi bertemakan politik berintegritas. Dalam materi tersebut, para peserta di jelaskan bagaimana gambaran sebuah politik yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip integritas. hal ini diangap penting karena, menjadi politisi yang berintegritas dewasa ini sangat dibutuhkan tidak hanya sebagai wakil rakyat saja tetapi menjadi persona yang mampu menampung aspirasi hingga menumbuhkan rasa cinta tanah air. Politik tidak hanya dipandang sebagai suatu hal yang hanya mementingkan golongan semata, namun hakikat politik yang sesungguhnya pun harus diajarkan kepada khalayak.

Gambar 3. *Peserta sebagaian besar perempuan (pemilih pemula)*

Berkelindan dengan tema yang ditentukan, maka sebagian peserta adalah perempuan, dimana para peserta setelah mendengar beberapa pemaparan dari materi narasumber, mereka diarahkan untuk membentuk beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi dan menguraikan apa peluang dan hambatan yang ditemukan ketika ingin berpartisipasi politik di lingkungan sekitar. Beberapa peserta dari kalangan mahasiswa sempat mengutarakan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, sehingga terkadang berpolitik bagi perempuan membutuhkan ketangguhan tertentu untuk melawan hal-hal yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat luas. Selain

itu, ada hambatan lain yang berkaitan dengan perspektif bahwa perempuan sangat terbatas langkahnya ketika ingin berpolitik.

Diskusi terkelompok dengan memaparkan kondisi sosial masing-masing menjadi nilai tambah tersendiri bagi narasumber dan peserta ketika mendiskusikan langkah apa yang sesuai dan adaptif ketika seorang perempuan ingin berpatisipasi.

Gambar 4. *Dokumentasi bersama narasumber dan peserta kegiatan*

Hasil dari kegiatan ini adalah ditemukannya beberapa hambatan yang secara riil disampaikan oleh beberapa peserta kegiatan yang menyebabkan lemahnya tingkat partisipasi perempuan dalam berpolitik. Selama ini perempuan di Kabupaten Malang aktif mengikuti kegiatan sosial keagamaan, kelompok-kelompok diskusi yang dibentuk mahasiswa dalam perguruan tinggi.

Gambar 5. *Pemberian cinderamata dan foto bersama*

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan berakhir dengan menghasilkan komitmen para peserta untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan yang memiliki sumbangsih terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat dilingkungan terkecilnya, utamanya yang berkaitan dengan politik. Selain itu para peserta telah berkomitmen untuk tidak memilih *golput* dalam pesta demokrasi di Indonesia dan segera

menginisasi kegiatan-kegiatan untuk membuka ruang aspirasi publik yang aman dan berkelanjutan berbasis kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa perempuan menghadapi beberapa hambatan yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam politik lokal, diantaranya adalah kurangnya akses terhadap pelatihan dan informasi politik dan minimnya dukungan moral dan struktural di dalam masyarakat. Serta adanya opini di dalam lingkungan mereka yang menganggap bahwa perempuan tidak begitu kompeten dalam kepemimpinan dan politik. Selain itu juga dipengaruhi oleh kepercayaan diri yang rendah dan kurangnya representasi politik lokal yang menjadi kendala signifikan yang menghambat keterlibatan perempuan di akar rumput.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa upaya edukasi yang efektif yaitu dengan menggunakan pendekatan komunitas dan partisipatif bagi perempuan. Pendidikan politik inklusif bagi perempuan dapat mengakomodir pengalaman hidup, bahasa yang mudah dipahami serta orientasi dan representasi politik di masa depan dapat menjadi sarana keterbukaan dalam dialog yang komprehensif. Pendekatan ini juga memungkinkan terciptanya ruang aman bagi perempuan untuk belajar, bertukar pikiran, berpendapat hingga mengadvokasi gerakan-gerakan inklusi lainnya yang menjadi kunci keterlibatan perempuan dalam politik lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur yang telah bekerja sama dengan Pusat Kajian Antikorupsi (PAKU) dan Pusat Studi Kebijakan dan Otonomi Daerah (PUSKADA) Universitas Islam Raden Rahmat Malang untuk menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat khususnya bagi pemilih pemula (perempuan) di wilayah Kabupaten Malang.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pusat Statistik, "Badan Pusat Statistik." https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html (accessed Jul. 10, 2022).

BPS Kab Malang, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang." https://malangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/15/409/banyaknya-kelurahan-desa-rw-dan-rt-per-kecamatan-2015-2020.html (accessed Nov. 17, 2022).

Ekonomi, H. D. *et al (2024).*, "Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Sosial , Politik ," vol. 1, no. 10, pp. 1456–1461, 2024.

Ethridge, M. E. and Handelman, H.. (2010). *Politics in a changing Woeld. A Comparative Introduction to Political Science*, 5th ed. Boston: Wadsworth.

Halim, R. and Lalongan, M.. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat. Teori dan Praktik*. Makassar: CV SAH MEDIA.

Hardjaloka, L.. (2012). "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif," *J. Konstitusi*, vol. 9, no. 2, pp. 404–430,.

Khaz, F. H. and Refdi (2024)., "Pendidikan Politik Bagi Perempuan Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik: Pendidikan Politik Bagi Perempuan," *J. Pengabdi. Masy. STIA LK*, vol. 3,

no. 2, pp. 194–198, Aug. 2024, Accessed: Apr. 25, 2025. [Online]. Available: https://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/pesat/article/view/151.

TEA TRUMBICSILVANA KOCH-MEHRIN and DOMINIK WEH. (2024). "Unlocking growth: The untapped power of women in political leadership," May 14. https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/unlocking-growth--the-untapped-power-of-women-in-political-leade (accessed Apr. 25, 2025).

ZA, I. and Yunita, A.. (2022). "Penguatan Kesadaran Politik Kaum Remaja Perempuan Melalui Kajian Regulasi Kuota 30% Perempuan Di Lembaga Legislatif," *JMM (Jurnal Masy. Mandiri)*, vol. 6, no. 1, p. 719, 2022, doi: 10.31764/jmm.v6i1.6603.